Pengawasan Retribusi Parkir Pasar Sentral Kota Kendari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Deny Heryanto ¹; Muh. Amir ²; Saidin ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, denyheryanto97@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan retribusi parkir di Pasar Sentral Kota Kendari, Serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan parkir di Pasar Sentral Kota Kendari dalam meningkatkan PAD Kota Kendari , metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, bersifat uraian dari hasil observasi,wawancara dan studi dokumentasi, terhadap 9 orang informan penelitian, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan retribusi parkir pasar sentral Kota Kendari dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setelah ditinjau berdasarkan instrument penelitian untuk pelaksanaan pengawasannya masih kurang efektif, dari aspek pengamatan kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas masih sangat lemah, aspek pimpinan untuk pengarahan pengawasan petugas hanya dilakukan dengan rentan waktu tiga , empat hari dalam sekali pengawasan, aspek pengendalian saat ini penyetoran target retribusi di pasar sentral Kota Kendari tidak memenuhi target dikarenakan sistem penyetoran retribusi dipasar ini sesuai dengan karcis yang keluar perdua puluh hari.

Kata kunci : *Pengawasan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah.*

Abstract

This study aims to determine and describe the supervision of parking fees in the Kendari City Central Market, and describe the factors that influence parking supervision in the Kendari City Central Market in increasing the PAD of Kendari City, the research method used is descriptive qualitative, a description of the results of observations, interviews and documentation studies, of 9 research informants, the data obtained were analyzed qualitatively and described in a descriptive form. The results showed that the supervision of Kendari City central market parking fees in increasing local revenue after reviewing based on research instruments for the implementation of its supervision was still ineffective, from the observation aspect of supervision activities carried out by officers was still very weak, the leadership aspect for directing supervision of officers was only carried out vulnerable within three, four days in a single supervision, the current control aspect of depositing target levies on the Kendari City central market does not meet the target because the system of depositing fees in this market is in accordance with the ticket that exits in twenty days.

Keywords : *Supervision, Parking Levy, Regional Original Revenue.*

Pendahuluan

Regulasi terkait pungutan Daerah seperti Pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak Kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang – undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Terkait dengan retribusi, undang – undang tersebut hanya mengatur prinsip – prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat di pungut daerah. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Retribusi Daerah. Selanjutnya peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat di pungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi.

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Dalam Undang – Undang yang baru dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi. Izin gangguan diperlukan hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum(Siahaan, 2010).

Memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan kesehatan kerja, terdapat 4 (empat) jenis retribusi baru bagi daerah yaitu retribusi izin usaha periklanan, retribusi pelayanan tera, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi jasa umum pemerintah Kota Kendari memungut 9 (Sembilan) jenis retribusi dari 14 (empat belas) yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu dari sembilan jenis retribusi tersebut adalah Retribusi Parkir. Retribusi ini memiliki potensi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, untuk memberikan dasar pengenaan Retribusi Parkir pemerintah Kota Kendari mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Saat ini pengelolaan parkir di pasar sentral kota Kendari dikelola langsung oleh petugas badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Kendari, dan pada praktiknya petugas yang berkerja di lapangan masih kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan kurangnya pengawasan dari pimpinan. Selama ini di Pasar Sentral Kota Kendari untuk retribusi parkir dengan tarif untuk kendaraan roda dua yaitu sebesar 2.000 rupiah dan untuk kendaraan roda empat yaitu sebesar 5.000 rupiah per unit di nilai cukup besar perolehan nya yang bisa dimasukan dalam pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi parkir ini, namun kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa pendapatan dari segi parkir ini tidak sepenuhnya disetor kepada pemerintah daerah melalui badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Kendari, penyeteroran retribusi parkir tergantung dari jumlah karcis yang diberikan kepada petugas parkir, yang hasil pemungutan disetor per duapuluh hari, padahal hal ini bisa menjadi permainan petugas parkir untuk meraup keuntungan pribadi olehnya itu pengawasan terhadap retribusi parkir ini sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemasukan pendapatan daerah dari segi retribusi parkir ini.

Pada aspek pengawasan pemerintah telah memberikan kewenangan yang cukup besar pada pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi retribusi parkir. Baik untuk memberikan sanksi administrative maupun pidana. Pada praktiknya pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, seakan tumpul dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak yang dapat dilihat signifikansi peranan bidang pemungutan retribusi pasar sentral kota kendari yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan terhadap retribusi parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan retribusi parkir pasar sentral kota Kendari dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Kendari dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan retribusi parkir pasar sentral kota Kendari dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Kendari. Berdasarkan kajian teoritis, maka kerangka pikir yang mendasari penelitian ini adalah fungsi pengawasan yaitu pengamatan, pimpinan dan pengendalian (Siagian, 2005)

Metode

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif di mana informan penelitian ini adalah Petugas Parkir Pasar Sentral Kota Kendari, Kepala Pasar Sentral Kota Kendari, Perangkat / Pegawai Pasar Sentral Kota Kendari, Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari dan pengguna parkir dengan total 9 orang. Teknik analisis data

dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (2002).

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Retribusi Parkir Pasar Sentral Kota Kendari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sector jasa perparkiran.

Kota kendari merupakan salah satu kota dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi Daerah selaian sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan langsung oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari untuk Pasar Sentral Kota Kendari

a. Pengamatan Pemungutan Retribusi

Proses pengamatan dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir merupakan hal yang paling penting sekali dilakukan untuk mengurangi resiko adanya tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petugas di lapangan sehingga mampu mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Kendari seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari. Maka dari itu dilaksanakannya pengawasan guna memaksimalkan parkir. Dengan ini penulis melakukan wawancara dengan kepala sub bagian Penetapan dan Keberatan wilayah II, BP2RD kota Kendari dengan hasil sebagai berikut :

“Pengawasan yang kami lakukan selama ini di lapangan sudah sesuai dengan aturan dalam pengawasan retribusi parkir, akan tetapi masih ada saja masalah yang sering terjadi, entah itu pungutan parkir yang sengaja dilebihkan atau juru parkir liar.” (Hasil wawancara dengan WF, Februari 2020).

Setelah itu penulis mengunjungi Pasar Sentral Kota Kendari dan langsung bertemu dengan salah satu petugas parkir yang berada di tempat, kemudian melakukan dengan hasil sebagai berikut :

“Kami sudah mengikuti sesuai dengan standar atau aturan yang telah di tetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, jadi apa yang kami lakukan sesuai dengan standar juru parkir sebagaimana mestinya dan selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat yang datang membeli di pasar ini.” (Hasil wawancara dengan LM juru parkir 1, Februari 2020).

Kemudian penulis mewawancarai salah satu pengguna parkir di Pasar Sentral Kota Kendari dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Ya, pemungutan retribusi parkir disini (Pasar Sentral Kota Kendari) saya rasa normal dan wajar yaitu dengan nominal 2000 rupiah untuk kendaraan roda dua untuk sekali parkir dan keamanan dan kenyamanan tidak kami khawatirkan lagi akan tetapi sempat beberapa kali saya tidak diberikan karcis parkir oleh petugas parkir.” (Hasil wawancara dengan AS, Februari 2020).

Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan.

b. Pimpinan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting dalam upaya meminimalisir penyelewengan-penyelewengan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka penyelewengan-penyelewengan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bias di minimalisir.

Demikian halnya dalam pengawasan retribusi parkir di kota Kendari terutama di kawasan Pasar Sentral Kota Kendari yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Kendari tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di kota Kendari. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melaksanakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Sedang pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Dari segi pengawasan, pengelolaan retribusi parkir di Pasar Sentral Kota Kendari menurut penuturan Kepala Sub Bagian Penetapan dan Keberatan wilayah II BP2RD kota Kendari adalah sebagai berikut :

“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang telah ditunjuk oleh BP2RD kota Kendari adalah dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).” (Hasil wawancara dengan WY, Februari 2020).

Sedangkan berdasarkan penuturan juru parkir adalah sebagai berikut :

“Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola tidak secara rutin dilakukan setiap hari akan tetapi setiap 4 hari sekali. Itu pasti ada pengawasan.” (Hasil wawancara dengan E juru parkir 3, Februari 2020).

Pengawasan parkir sering mengalami ketidakrutinan kegiatan pengawasan, hal ini menurut Kepala Pasar Sentral Kota Kendari adalah sebagai berikut :

“Ketidakrutinan petugas melakukan pengawasan dikarenakan kurangnya petugas/personil dibidang pemungutan retribusi.” (Hasil wawancara dengan M, Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Petugas sudah menjalankan proses pengawasan retribusi parkir, pengawasan dilakukan setiap hari kerja oleh petugas Bidang Retribusi di Pasar Sentral Kota Kendari yang merupakan pegawai pemerintah daerah namun dalam pelaksanaannya petugas parkir terkadang tidak melakukan pengawasan secara rutin bahkan terkadang hanya 3/4 hari sekali. Petugas parkir lebih berkerja pada kegiatan pemungutan retribusi parkir. Hal ini bisa saja dijadikan sebagai penyebab masih belum terbitnya pengelolaan parkir seperti keamanan dan kelengkapan atribut juru parkir. Kegiatan penertiban juga akan berpengaruh terhadap pengontrolan retribusi parkir yang berkaitan dengan lahan-lahan parkir yang harus membayarkan retribusi parkirnya ke pemerintah. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas masih sangat tidak efektif dikarenakan dilakukan hanya dalam tiga atau empat hari sekali saja

c. Pengendalian

Pengendalian dalam hal ini yaitu dengan menetapkan target retribusi parkir yang harus dicapai oleh petugas pasar sentral kota Kendari dan melihat bagaimana dalam pencapaiannya.

Bidang Pengelola Pendapatan Wilayah II, merupakan unsur pelaksana teknis operasional atau teknis penunjang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengelola perpajakan yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian perpajakan ditempat-tempat khusus. Dengan ini penulis melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut :

“Tujuan kami yaitu agar masyarakat paham akan pentingnya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, meningkatkan pelayanan dari sector parkir dan selanjutnya meningkatkan pendapatan dari sector retribusi perpajakan.” (Hasil wawancara dengan WY, Februari 2020).

Wajib Retribusi dan Tarif Retribusi sudah diatur oleh Pemerintah Kota Kendari melalui Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 dan Bidang Pengelola Pendapatan Wilayah II BP2RD kota Kendari telah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang ada, kemudian peraturan daerah tersebut tidak memberatkan pengendara kendaraan bermotor, namun untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan dan realisasi dalam penerimaan retribusi perlu adanya penyesuaian tarif oleh pemerintah daerah hal ini mengingat perkembangan kota Kendari yang semakin padat kendaraan, dalam pelaksanaannya masyarakat banyak yang membayar retribusi melebihi tarif yang telah ditentukan hal ini didasari karena tidak memiliki uang kecil sehingga membayar tarif 2 kali lebih besar dari yang ditentukan, maka dari itu pentingnya melakukan pengawasan kepada semua petugas atau juru parkir. Penulis mencoba mewawancarai salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Pasar Sentral Kota Kendari dengan Hasil sebagai berikut :

“Jika pemungutan retribusi parkir ini tidak diawasi dengan baik maka akan menimbulkan permainan dalam pungutan nya karena hal ini tidak tercatat oleh petugas, sehingga penyelewengan bias saja terjadi.” (Hasil wawancara dengan US, Februari 2020).

Retribusi dari sector parkir ini apabila dapat dikelola dengan baik akan mampu memberikan pemasukan yang cukup besar terhadap kas daerah dan akan menjadi pemasukan yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh berkerjasama dengan pihak ketiga. Namun pelaksanaannya pemungutan difokuskan kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Wilayah II, Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah kota Kendari karena harus dilaksanakan secara selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis. Dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi menjadi sebuah dasar dalam proses pungutan dan proses penyetoran hasil pungutan, hal ini pula yang menjadi dasar keberhasilan dalam penerimaan apabila semuanya telah dilaksanakan dengan maksimal maka dapat meminimalisir tindakan penyelewengan.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan pungutan berjalan dengan baik dan lancar, system dan pemungutan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan hal ini diharapkan dapat meminimalisir penyelewengan oleh petugas parkir dan pengelola pasar dalam proses pungutan. Namun keadaan yang terjadi di lapangan tidak semuanya berjalan dengan aturan yang ada pula beberapa petugas nakal yang tidak memberikan karcis jika tidak diminta oleh pengendara dan adanya kenaikan tarif retribusi yang tidak sesuai karcis.

Meningkatkan pendapatan dari sektor publik membutuhkan strategi yang tepat. Orang yang memarkirkan kendaraannya perlu mendapatkan kepastian pelayanan yang baik dan memadai, terutama dalam hal keamanan parkir, pelayanan di sektor perparkiran merupakan pelayanan jasa yang memberikan kebermanfaatan dalam menjaga keamanan kendaraan masyarakat yang parkir. Seperti hasil wawancara penulis dengan kepala Pasar Sentral Kota Kendari adalah sebagai berikut :

“Sebagai petugas pasar dan aparatur pemerintah kita harus mengupayakan penegakan hukum yang tegas untuk ketertiban parkir juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan

mekanisme yang baik maka jumlah kendaraan pun akan meningkat.” (Hasil wawancara dengan M, Februari 2020).

Berdasarkan keterangan di atas proses pengawasan berjalan dengan lancar namun kejadian di lapangan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal dikarenakan jumlah pengawas yang di tunjuk untuk mengawasi retribusi parkir tidak sebanding dengan jumlah petugas parkir, sehingga untuk pengawasan pemungutan retribusi harus lebih ditingkatkan lagi untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan kepada petugas parkir. Agar dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh petugas.

Pelaksanaan di dalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya manusia. Masalah pelaksanaan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Dengan demikian dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh orang-orang yang di tunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan retribusi parkir. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Penetapan dan Keberatan Wilayah II BP2RD kota Kendari sebagai berikut :

“Pemungutan retribusi parkir di Pasar Sentral Kota Kendari dilakukan oleh petugas juru parkir yang telah di tunjuk oleh BP2RD.” (Hasil wawancara dengan WY, Februari 2020).

Sedangkan yang menjadi subyek dan obyek retribusi parkir seperti yang di sampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penetapan dan Keberatan Wilayah II BP2RD kota Kendari adalah sebagai berikut :

“Yang menjadi subyek retribusi parkir adalah masyarakat itu sendiri, dikarenakan masyarakat merupakan pengguna layanan parkir, sedangkan yang menjadi obyek adalah tempat parkir yang digunakan oleh masyarakat.” (Hasil wawancara dengan WY, Februari 2020).

Masyarakat sebagai pengguna layanan atau disebut subjek retribusi merupakan pihak yang dikenakan layanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan public yang prima dari pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Layanan yang baik diberikan yaitu salah satunya dengan cara menyediakan objek parkir yang memadai dengan aman. Memadai dalam hal ini yaitu lokasi parkir sesuai dengan kebutuhan. Aman dalam artian tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan bagi masyarakat pengguna parkir ketika memarkir kan kendaraannya di lokasi parkir.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna parkir sebagai berikut :

“Selama menggunakan jasa parkir di pasar ini, saya sebagai pengguna jasa masih belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas, karena selama saya menggunakan jasa parkir saya masih tidak tenang/kurang percaya selama meninggalkan kendaraan di area parkir.” (Hasil wawancara dengan LW Februari 2020).

Memang masih ada beberapa lokasi yang perlu ditingkatkan keamanan dan fasilitas yang minim dikarenakan kurangnya perhatian dan kesadaran pengawas. Jika dibiarkan, pengguna parkir harus berpikir berapa kali untuk memar kirkan kesadarannya dan kejadian ini dapat mengakibatkan kurangnya kapasitas penerimaan retribusi dalam sektor parkir ini.

Selain faktor keamanan dan kenyamanan lokasi parkir, layanan parkir juga berkaitan dengan keramahan dan kecekatan kerja dari juru parkir. Dalam hal ini peneliti menanyakan Kepala Pasar Sentral Kota Kendari tentang petugas yang tidak mematuhi peraturan di saat pemungutan retribusi parkir sebagai berikut :

“Mungkin ada saja petugas yang tidak sesuai aturan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi aparat kami sudah berusaha memberikan pengarahan setiap bulannya dengan agenda kerja yang ada.” (Hasil Wawancara dengan M, Februari 2020).

Untuk pemungutan pembayaran parkir di Pasar Sentral Kota Kendari mempunyai aturan sebagai berikut :

1. Retribusi parkir dipungut setiap kali kendaraan tersebut parkir di tempat parkir.
2. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar lunas sekaligus.
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepala Sub Bagian Penetapan dan Keberatan wilayah II BP2RD kota Kendari tentang proses pemungutan retribusi parkir di Pasar Sentral Kota Kendari Sebagai berikut :

“Untuk pemungutan retribusi parkir kami memiliki karcis, dan karcis tersebut dapat diambil di kantor BP2RD dan karcis yang kami berikan ke pasar sesuai dengan target per duapuluh hari.” (Hasil wawancara dengan WY, Februari 2020).

Dalam pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas

pemungut maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pengutan tersebut.

Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan asli daerah tahun 2016 hingga 2018, untuk tahun 2019 penulis belum bias di dapatkan dikarenakan sebab sebagai berikut, hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penetapan dan Kebaratan Wilayah II BP2RD kota Kendari :

“Untuk data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari tahun 2019 kami dari BP2RD belum bisa mempublisnya dikarenakan masih dalam tahap audit.” (Hasil wawancara dengan WS, Februari 2020).

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2016	284.968.935.797.00	179.062.775.226.99	62.84
2.	2017	408.845.410.745.00	218.340.628.965.02	53.45
3.	2018	1.447.056.236.889.00	1.232.806.862.310.85	85.19

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari 2020

Dari data di atas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun jika ditinjau dari target PAD secara keseluruhan yang di tentukan sebelumnya oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah Kota Kendari belum dapat terealisasi

Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Pasar Sentral Kota Kendari maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimalkan sebagai akibat dari efisiensi dan efektifitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapat asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah di tentukan sebelumnya.

Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan Retribusi Parkir Pasar Sentral Kota Kendari sejak tahun 2017 sampai tahun 2019. Dan untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3. Realisasi Retribusi Parkir Pasar Sentral Kota Kendari

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran yang belum Terealisasi (Rp)
1.	2017	130.000.000	79.929.000	61.48	50.071.000
2.	2018	130.000.000	72.000.000	55.38	58.000.000
3.	2019	130.000.000	58.800.000	45.23	124.120.000

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari 2020

Berdasarkan tabel 3 Realisasi Parkir Pasar Sentral Kota Kendari secara keseluruhan dalam 3 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami penurunan dari tahun-tahun dan yang mengalami penurunan paling mencolok pada tahun 2019 yaitu mempunyai selisih sebesar Rp 124.120.000.

Menurut penulis, hal tersebut sebabkan oleh pengawasan yang dilakukan kurang efektif, masih banyaknya parkir liar di sekitaran pasar, perubahan proses pembelanjaan masyarakat yang sekarang lebih mengarah kepada online shop sehingga berkurangnya berkunjung ke pasar tradisional, masih didapatkan nya pengguna parkir yang tidak diberikan karcis , dan sistem target retribusi parkir yang belum mempunyai target yang jelas dikarenakan target retribusi parkir di pasar ini hanya tergantung dari karcis yang keluar per duapuluh hari sehingga membuka peluang untuk oknum-oknum petugas untuk melakukan penyimpangan demi kepentingan pribadi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Pengawasan retribusi parkir pasar sentral kota kendari dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang dilakukan oleh BP2RD Kota Kendari masih kurang efektif di karenakan a)

Pengamatan yang dilakukan oleh petugas BP2RD masih sangat kurang dikarenakan masih di dapatkan petugas parkir yang tidak memberikan karcis, sengaja menaikkan tarif retribusi parkir dan masih banyak parkir liar. b) Pimpinan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang hanya melakukan pengawasan dalam tiga atau empat hari sekali, hal membuat kesempatan bagi oknum-oknum petugas untuk melakukan penyimpangan. c) Pengendalian, saat ini penyeteroran target retribusi di pasar sentral Kota Kendari tidak memenuhi target dikarenakan sistem penyeteroran retribusi dipasar ini sesuai dengan karcis yang keluar per duapuluh hari hal tersebut membuat peluang bagi oknum-oknum petugas untuk mendapatkan keuntungan pribadi..

Referensi

- Ahmad Yani. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Devas, Nick, dkk. (2007). *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Universitas Indonesia (UI-Press) : Jakarta.
- Erni Tris Kurniawan, Suledan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen*, Prenada Media: Jakarta.

- Husaini. (2008). *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Edisi 4)*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Josef Riwu Kaho. (2007). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. PT Grafindo Persada : Jakarta.
- Kadarman & Udaya. (2001). *Pengantar Ilmu Manajemen, Edisi Baru*. PT Prenhallindo: Jakarta.
- Manullang, M. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University. Yogyakarta.
- Maringan Marsy. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. (2006). *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Salemba Empat : Jakarta.
- Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman. (2002). *Penelitian Kualitatif penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*”, Penerbit Universitas Indonesia : Jakarta.
- Mulyadi. (2007). *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Rajawali Press : Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
- Siagian, Sondang P. (2005). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sudibyo Triadmojo. (2000). *Sistem Pengawasan*. LAN: Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.